

MONITOR BERITA

11

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

## Swasta bisa masuk hulu-hilir migas

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah akhirnya mengesahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas menjadi PP yang membuka peluang swasta mengikuti kedua bidang tersebut.

Pengesahan regulasi yang sempat tertunda akibat adanya tumpang-tindih kewenangan pemerintah itu ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2004 untuk kegiatan usaha hulu migas dan PP No. 36/2004 untuk kegiatan usaha hilir pada 14 Oktober.

"Sudah disahkan kemarin [pekan lalu], saya lupa tanggalnya berapa," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Minggu malam lalu.

Menteri menegaskan pengesahan PP itu akan mem-

perjelas operasionalisasi sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah dalam UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

PP itu, lanjutnya, diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan hilir migas yang belum terinci dalam UU tersebut. "Itu [PP] operasionalisasi saja, semuanya sesuai dengan UU [No. 22/2001]."

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luluk Sumiarso mengungkapkan pemerintah tidak mengubah substansi kebijakan atau regulasi yang diusulkan dalam rancangan peraturannya (RPP).

Perubahan yang dilakukan, kata dia, hanya menyempurnakan pernyataan yang memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi (bias).

"Tidak ada yang diubah se-

cara substansi dari RPP-nya. Cuma penyempurnaan untuk menghindari bias [terkait tumpang-tindih kewenangan pemerintah]."

Secara rinci, PP No.35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memperjelas sejumlah aturan yang dicantumkan dalam UU No.22/2001, a.l. perpanjangan kontrak kerja sama dan penetapan porsi pemanfaatan migas untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation/ DMO*).

Menurut PP itu, badan usaha atau kontraktor bagi hasil (kontraktor *production sharing/KPS*) dapat mengajukan perpanjangan kontrak yang disampaikan paling lambat dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.

Dalam hal PT Pertamina, permohonan kepada menteri [Energi dan Sumber Daya Mineral] untuk memperpan-

jang kontrak di suatu wilayah kerja akan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis, dan keuangan PT Pertamina sepanjang 100% saham BUMN itu masih dikuasai negara.

Sementara itu, PP No. 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi memperjelas pengaturan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.

Kepala Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono menegaskan penetapan PP itu menjadi langkah awal kinerja badan pengatur untuk meneruskan regulasi secara teknis.

"Dengan PP keluar, tentunya kami berlari cepat. Beberapa waktu ini, BPH Migas segera menerapkan aturan untuk distribusi migas, terutama gas melalui pipa," ujarnya kepada *Bisnis* kemarin. (06)

5

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	TAHUN 2004

# Presiden Sahkan PP Hulu dan Hilir Migas

"Secara politis, kebijakan ini malah membuat pemerintahan baru menghadapi masalah."

JAKARTA — Presiden Megawati Soekarnoputri akhirnya menandatangani pengesahan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi menjadi peraturan pemerintah. Penandatanganan itu dilakukan pada Kamis (14/10) lalu, dan diserahkan pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral keesokan harinya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kedua peraturan pemerintah yang disahkan itu mengatur pelbagai hal sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. "Diharapkan peraturan pemerintah yang baru ini akan menyegarkan kembali investasi di sektor migas," katanya kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Seperti diberitakan, rancangan peraturan kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi telah lama ditunggu-tunggu para investor dalam maupun luar negeri. Selama tiga tahun terakhir, ti-

dak pernah ada kejelasan kapan peraturan ini akan diterbitkan. Rancangannya pun telah berkali-kali dikembalikan oleh Sekretariat Negara ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo, alasan utama pengembalian kedua rancangan itu karena dominannya peran pemerintah dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi. "Itu tidak sesuai dengan semangat liberalisasi sektor minyak dan gas bumi," kata dia. Dengan kata lain, kebijakan yang mengatur sektor hulu dengan hilir itu tidak selaras dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Namun, sejak revisi rancangan terakhir diserahkan pada Sekretariat Negara pada akhir Agustus lalu, Kesowo mengatakan, tidak ada lagi hal yang mengganjal.

Sementara itu, peraturan pemerintah tentang kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi mengatur berbagai hal strategis

di sektor tersebut. Untuk kegiatan hulu, selain menegaskan peran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas, pelbagai aturan menyangkut wilayah kerja dan kontrak kerja sama, termasuk perpanjangannya (lihat: "Detik Terakhir").

Kendati demikian, tindakan Presiden menandatangani peraturan pemerintah itu disayangkan sejumlah pihak.

Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, Presiden Megawati tidak perlu tergesa-gesa mengesahkannya karena undang-undang yang memayunginya sedang melalui proses uji materiil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi. "Meneruskan undang-undang yang buruk berbahaya bagi industri migas Indonesia dalam jangka panjang," kata dia kepada *Tempo*.

Menurut dia, kedua peraturan pemerintah itu tidak bisa menyelesaikan pelbagai permasalahan yang timbul akibat undang-undang migas yang baru. Hal yang paling mengganjal adalah ketentuan perpajakan yang sangat

membebani investor karena harus dibayar di muka sebelum produksi membuahkan hasil. Kendati PP Hulu mengatur bah-

wa kontraktor bisa memilih, Kurtubi tetap skeptis.

"Ketentuan itu justru akan menimbulkan ketidakpastian

dan masalah baru. Secara politis, kebijakan ini malah membuat pemerintahan baru menghadapi masalah." • *dara meutia uning*

## DETIK TERAKHIR

Setelah sempat mandek selama tiga tahun, detik-detik terakhir menjelang lengser, Presiden Megawati akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Hulu dan Hilir Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini sangat ditunggu-tunggu karena akan menjadi pedoman investor yang bergerak di industri pertambangan. Berikut pokok-pokok penting dalam peraturan itu.

### I. PP HULU MIGAS

- Pertamina bisa mengajukan permohonan pada Menteri untuk mendapatkan wilayah kerja terbuka tertentu, dan untuk wilayah kerja yang telah habis masa kontraknya selama 100 persen sahamnya masih dimiliki negara.
- Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama yang akan diberlakukan untuk wilayah kerja tertentu, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Pelaksana.
- Kontrak kerja sama dapat diperpanjang hingga 20 tahun, setiap kali diperpanjang.
- Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10 persen pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Sebelum kontrak ditandatangani, kontraktor dapat memilih ketentuan kewajiban membayar pajak, yakni mengikuti ketentuan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani atau mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

### II. PP HILIR MIGAS

- Izin usaha kegiatan usaha hilir diberikan oleh Menteri. Kegiatan usaha hilir terdiri dari usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, serta usaha niaga minyak dan gas bumi.
- Kegiatan penyaluran langsung oleh badan usaha maksimal 20 persen dari jumlah sarana dan fasilitas yang dikelola atau dimiliki badan usaha.
- Harga BBM dan gas bumi, kecuali gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Harga gas untuk rumah tangga diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- Harga eceran bahan bakar minyak di dalam negeri terdiri dari harga di tingkat badan usaha, ditambah biaya distribusi dan margin pengecer serta pajak.
- Menteri dapat bertindak, jika terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang disebabkan kondisi darurat (*force majeure*). Bila harga BBM dan gas jenis LPG tidak stabil atau bergejolak pemerintah dapat turun tangan. ● dara

6

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 17																																												
TAHUN 2004																																												

# PP Hilir-Hulu Keluar, Pertamina Tak Lagi Monopoli Ritel

JAKARTA (Suara Karya): Monopoli di sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) mulai terhapuskan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) No.36 tahun 2004 sebagai implementasi dari Undang-undang (UU) No.22 tahun 2001 tentang Migas.

Hadirnya PP Hilir dan PP Hulu yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarno Putri ini mencakup 100 pasal, mengatur adanya open akses oleh badan-badan usaha lain untuk menghapus monopoli yang dilakukan Pertamina sebelumnya. Namun usaha hilir hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha. Badan usaha tersebut juga harus menyediakan dan mendistribusikan BBM di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil untuk ketersediaan pasokan. Selain itu, badan usaha itu juga harus menjamin harga jual BBM pada tingkat yang wajar.

Dengan dikeluarkannya, PP Hilir ini, dapat dipastikan, industri hilir dalam negeri akan mulai diserbu oleh para investor lokal maupun asing yang akan bersaing dengan Pertamina.

Sejauh ini Badan Pengatur usaha hilir migas (BPH Hilir) baru mengeluarkan izin kepada enam perusahaan untuk bergerak di sektor ritel BBM, di antaranya izin prinsip kepada Royal Dutch/Shell Group, melalui anak perusahaannya PT Krida Petragraha serta kepada lima perusahaan lokal, yaitu PT Sigma Rancang Perdana, PT Pandu Selaras, PT Elhusa Petrofin, PT Elnusa Harapan, dan PT Raven Sejahtera.

Izin yang akan diterbitkan adalah izin prinsip. Jenis perizinan ini memiliki masa berlaku minimal satu tahun atau maksimal dua tahun. Masa berlaku itu tergantung dari nilai investasi yang ditanamkan oleh investor.

Artinya, izin akan hangus dengan sendirinya bila investor tidak melakukan kegiatan apapun. Perusahaan itu secepatnya bisa beroperasi karena begitu Peraturan Pemerintah (PP) Hilir keluar, akan dibuatkan pedoman wilayah kerja masing-masing perusahaan.

### Proses Lama

Di saat bersamaan, pemerintah juga melansir PP di sektor Hulu Migas. Kedua PP yang telah memakan waktu yang lama dalam proses kelahirannya, selama kurang lebih tiga tahun tidak pernah ada kejelasan, rancangannya telah berkali-kali dikembalikan Sekretariat Negara ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Alasan utama dikembalikannya rancangan itu, menurut Mensesneg Bambang Kesowo, karena porsi pemerintah dalam kegiatan migas masih sangat besar. Padahal, semangat yang terkandung dalam UU Migas yang baru adalah semangat liberalisasi yang lebih mendekatkan pada peran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir. Rancangan yang telah direvisi pada September lalu akhirnya ditandatangani presiden di pengujung masa jabatannya.

Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Luluk Sumiarso, hadirnya kedua PP tersebut memberikan angin segar bagi investasi sektor hulu dan sektor hilir migas di dalam negeri.

Pasalnya PP tersebut sekian lama telah ditunggu banyak kalangan investor lokal maupun asing. "PP yang baru ini diharapkan akan menyegarkan kembali investasi di sektor migas."

Dalam PP No 35/2004 yang mengatur sektor hulu migas berisikan, penetapan permohonan perpanjangan kontrak kerja sama oleh kontraktor melalui BP Migas dapat disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat dua tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir. Selain itu, pemerintah juga menetapkan ketentuan jangka waktu perpanjangan kontrak kerja sama paling lama 20 tahun untuk setiap kali perpanjangan.

Menanggapi keluarnya PP hulu ini, Wakil Kepala BP Migas Kardaya Warnika menyatakan pihaknya menyambut baik diterbitkannya PP tersebut. "Pasalnya, kata Kardaya, selama ini investor asing telah menanti diterbitkannya PP itu. "Dengan adanya PP itu, payung hukum bagi investasi migas di Indonesia makin jelas. Diharapkan hal tersebut akan memicu naiknya investasi migas di dalam negeri," jelas Kardaya.

Melalui PP hulu, pemerintah juga mewajibkan kontraktor untuk menawarkan *participating interest* 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pernyataan minat dan kesanggupan untuk mengambil *participating interest* harus disampaikan BUMD dalam jangka 60 hari sejak tanggal penawaran dari kontraktor. Selain itu kontraktor juga dapat

mengalihkan, menyerahkan dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan menteri berdasarkan pertimbangan BP-Migas.

Disamping itu PP Hulu yang terdiri dari 105 pasal juga mewajibkan kontraktor bertanggung jawab memenuhi kebutuhan minyak bumi dan gas bumi dalam negeri berdasarkan sistem prorata hasil produksinya. Besaran kewajiban kontraktor paling besar 25 persen bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi. Bahkan, menteri ESDM juga menetapkan besaran kewajiban setiap kontraktor dalam memenuhi kebutuhan minyak bumi dan gas bumi dan menetapkan kebijakan mengenai pemasangan minyak bumi dan gas bumi untuk keperluan dalam negeri setiap setahun sekali. (CW-1)

7

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 MAJALAH PILARS  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2004

# Kontraktor Bertanggung Jawab Penuhi Migas Domestik

JAKARTA, KOMPAS — Badan usaha yang menjadi kontraktor, yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi wilayah kerja pertambangan minyak dan gas di Indonesia, kini terikat dalam peraturan pemerintah untuk ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi untuk keperluan di dalam negeri. Setiap kontraktor wajib menyiapkan bagian produksi gas maksimal sebesar 25 persen dari produk yang menjadi bagiannya.

Demikian dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas yang diperoleh wartawan, Senin (18/10). Peraturan itu dikeluarkan pemerintah bersamaan dengan PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Migas sebagai implementasi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001.

Dalam Pasal 46 Ayat (1) disebutkan, besarnya kewajiban kontraktor untuk memenuhi keperluan dalam negeri ditetapkan berdasarkan sistem pro-rata hasil produksi migas. Besaran kontraktor adalah paling banyak 25 persen dari produksi migas bagian kontraktor.

Sementara penetapan besaran kewajiban setiap kontraktor dalam memenuhi kebutuhan minyak atau gas di dalam negeri ditetapkan oleh menteri. Penetapan kebijakan pemasokan minyak atau gas di dalam negeri dibuat setiap tahun sekali.

Menanggapi PP yang memiliki 105 pasal tersebut, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, seharusnya tidak ada batasan kewajiban pasokan gas di dalam negeri. Terutama pasokan gas untuk meningkatkan pemakaian gas bagi sektor transportasi, rumah tangga, atau industri di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hu-

lu Migas Kardaya Warnika mengatakan, sebenarnya semua keputusan akhir mengenai pemanfaatan gas ada di tangan pemerintah. Selama masih tidak ada permintaan dalam negeri, penjualan gas bisa ke luar negeri 100 persen. Sebaliknya, kalau tak ada penjualan gas ke luar negeri, juga bisa digunakan 100 persen di dalam negeri.

"Misalnya gas yang dihasilkan kontraktor di Jawa Timur dan Laut Jawa, 100 persen dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik. Sedangkan gas dari Tangguh Papua dijual ke luar negeri," ujar Kardaya.

PP Hulu Migas juga mengatur persyaratan dari kontrak yang dibuat pemerintah dengan badan usaha yang mengelola wilayah kerja pertambangan. Antara lain, penerimaan negara, pengembalian penerimaan wilayah kerja, kewajiban pengeluaran dana, perpindahan kepemilikan hasil produksi migas, jangka waktu kontrak, penyelesaian perselisihan, kewajiban kebutuhan domestik, kewajiban pasca-operasi tambang, pengelolaan lingkungan, pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat, serta pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

PP Hulu Migas juga mengatur

### Hal-hal Penting mengenai PP Hulu dan Hilir Migas

#### PP Hulu

- Kontrak kerja sama wajib memuat beberapa ketentuan, antara lain kewajiban pasca-operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia, pengembangan masyarakat sekitarnya, dan jaminan masyarakat adat.
- Permohonan perpanjangan kontrak dapat disampaikan 10 tahun dan paling lambat dua tahun sebelum kontrak berakhir.
- Kewajiban memasokkan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 25 persen dari hak produksi.
- Sejak disetujui rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi, kontraktor wajib menawarkan "participating interest" sebesar 10 persen kepada badan usaha milik daerah (BUMD).
- Kontraktor dapat memilih ketentuan kewajiban membayar pajak, mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku saat kontrak ditandatangani, atau mengikuti setiap perubahan peraturan perundangan.

#### PP Hilir

- Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha, diselenggarakan melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
- Badan pengatur menetapkan kewajiban badan usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil.
- Badan pengatur menetapkan alokasi cadangan BBM dari setiap badan usaha.
- Badan pengatur menetapkan pemanfaatan bersama, termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM.
- Badan pengatur menghitung dan menetapkan iuran badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM.
- Badan pengatur menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
- Harga BBM dan gas, kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar.

kewajiban kontraktor untuk menyertakan badan usaha milik daerah dengan batas maksimal partisipasi *interest* sebesar 10 persen. Selain itu, diatur bahwa kontraktor boleh memilih peraturan perundangan yang berlaku saat kontrak ditandatangani atau mengikuti perubahan peraturan pajak.

#### PP Hilir

Sementara itu, PP Hilir yang memuat 100 pasal mengatur adanya akses terbuka oleh badan-badan usaha lain untuk menghapus monopoli Pertamina dalam bisnis pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri selama ini. Kini dengan adanya PP Hilir, usaha tersebut dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang memiliki izin dari pemerintah.

Badan usaha yang telah memiliki izin usaha diwajibkan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan. Begitu pula dengan daerah terpencil, badan usaha wajib memberikan jaminan adanya pasokan BBM.

Sesuai dengan PP Hilir tersebut, yang melaksanakan ke-

giatan usaha niaga minyak bumi, gas, BBM, bahan bakar gas wajib memiliki izin usaha niaga dari menteri. Badan usaha itu juga harus menjamin harga jual BBM pada tingkat yang wajar.

Seperti diketahui, selama ini ada enam perusahaan yang mengantongi izin berjualan BBM di dalam negeri untuk memulai era liberalisasi penjualan bahan bakar di Indonesia. Perusahaan itu, satu perusahaan asing, PT Krida Petra Graha (Shell), dan lima perusahaan lokal, yaitu PT Sigma Rancang Perdana, PT Pandu Selaras, PT Elnusa Petropine, PT Elnusa Harapan, serta PT Raven Sejahtera.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Sektor Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono mengatakan, perusahaan tersebut belum dapat memulai kegiatan karena PP Hilir belum terbit. Saat PP Hilir belum diterbitkan pemerintah, Tubagus mengatakan, enam perusahaan itu ibarat "pembalap motor" yang berada di garis start dan menunggu bendera start diangkat. (BOY)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 5										TAHUN 2004																			

## Rini dukung amendemen UU Migas

JAKARTA (Bisnis): Menperindag Rini M.S. Soewandi mendukung sepenuhnya amendemen UU Migas No. 22/2001 karena terbukti menghambat pasokan bahan baku gas untuk produksi pupuk dalam negeri.

Menperindag khawatir bila UU Migas yang belum mewajibkan produsen gas mengalokasikan sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri tersebut tidak di-amandemen, maka kelancaran produksi pupuk bisa terancam.

"Di UU itu memang ada kewajiban produsen gas mengalokasikan gasnya sampai 25%, tapi di situ tertulis maksimum, jadi oleh Menteri ESDM

[Energi dan Sumber Daya Mineral] diterjemahkan sampai 0% itu boleh-boleh saja," tandasnya kemarin.

Keadaan ini, kata dia, menyebabkan produsen gas lebih memilih menjual gasnya ke luar negeri. Sementara di sisi lain, pasokan gas sebagai bahan baku pupuk di dalam negeri makin berkurang.

Rini menegaskan kondisi tersebut akan berbeda bila UU Migas mewajibkan produsen gas mengalokasikan gasnya ke dalam negeri sebesar minimal 25%. "Ya... memang di UU Migas sekarang sudah diwajibkan, tapi kan itu maksimum, bukan minimum," ungkapinya.

Masalah ini, dia menutur-

kan harus terus dipersoalkan karena ini menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang terbatas, yang kepemilikannya harus dikembalikan kepada rakyat.

Oleh sebab itu, Menperindag menambahkan sudah sepantasnya bila bahan baku ini diolah dulu di dalam negeri. Menurut dia, apakah kemudian gas diolah menjadi pupuk atau bahan kimia lainnya, itu soal lain.

"Yang jelas kalau diolah di dalam negeri dulu itu lebih baik lalu dijual sebagai produk ke luar negeri, akan ada nilai tambah yang bisa kita peroleh, akan ada investasi, dan penyerapan tenaga kerja juga."

Pihaknya, Rini mene-

gaskan juga telah merekomendasikan kepada Presiden agar UU Migas ini dikoreksi, terutama pada pasal yang berpotensi menyebabkan kelangkaan pupuk itu.

Seperti diketahui, permintaan *judicial review* terhadap UU Migas sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak beberapa waktu lalu. MK sendiri sudah memulai persidangannya pada 29 Juli 2004.

Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) yang bertindak sebagai pemohon mengatakan pengujian itu dilakukan karena UU Migas dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. (11)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB * MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT <b>OKT</b> NOV DES	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 <b>19</b> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 5	TAHUN 2004

# Menperindag Minta UU Migas Diamendemen

JAKARTA (Media): Undang-Undang No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi seharusnya diamendemen, khususnya mengenai kewajiban produsen migas mengalokasikan 25% produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Pasalnya, industri pupuk nasional mengalami kesulitan bahan baku gas akibat pihak produsen tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Pemintaan agar UU Migas tersebut diamendemen disampaikan Menperindag Rini MS Soewandi dalam rapat di Pusat Solusi Bisnis di Jakarta, kemarin.

Menurut Menperindag, sejauh ini ada perbedaan tafsir antara pihaknya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai pengalokasian 25% produk migas bagi kebutuhan dalam negeri itu.

"Saya usulkan supaya ketentuan maksimal 25% itu diubah menjadi minimum saja. Karena menurut Menteri ESDM jika alokasinya 0% saja tidak melanggar UU Migas," jelas Rini.

Ketentuan mengenai kewajiban para produsen migas ini terutang pasal 22 UU Migas, bahwa setiap badan usaha wajib menyertakan paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sejauh ini, UU No 22/2001 tentang Migas masih dalam pembahasan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan uji materiil dari sejumlah kelompok masyarakat yang menilai dampak dari pelaksanaan UU ini banyak merugikan kepentingan nasional.

Lebih lanjut Rini mengatakan, hal ini adalah persoalan besar karena gas alam merupakan sumber daya alam nasional tetapi lebih banyak diekspor ke luar. Apalagi gas merupakan energi yang tidak terbarukan tetapi yang menikmati adalah orang luar.

Padahal, tegas Menperindag, ada kewajiban bagi produsen mengenai alokasi gas bagi industri pupuk tersebut. Sebab, gas alam sebetulnya bisa diolah menjadi produk untuk kemudian di-

jual ke luar. "Dengan demikian produk ini mendatangkan nilai tambah bagi rakyat dan menyerap tenaga kerja yang banyak."

Pada kesempatan yang sama, Pengurus Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Suhardi mengaku heran dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan gas untuk ekspor dibandingkan kebutuhan dalam negeri. Sehingga hal ini membuat industri pupuk nasional seperti PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) tidak lagi memproduksi.

"PT AAF sendiri mampu membeli gas dengan harga di atas US\$2/MMBTU atau di atas harga kontrak. Meski masih di bawah harga internasional. Di sisi lain pabrik AAF masih bisa dimanfaatkan dan tergolong efisien," jelasnya.

Sementara, Dirjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Deperindag Benny Wahyudi mengatakan, kebijakan pemerintah yang terakhir untuk menjamin suplai gas untuk pabrik pupuk di Aceh adalah pasokan 75 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk dua pabrik, PIM I dan PIM II.

Namun, sampai saat ini pelaksanaannya baru mencapai 67 MMSCFD. Padahal, kebutuhan untuk tiga pabrik totalnya mencapai 170 MMSCFD. Pasokan 75 MMSCFD itu baru untuk satu pabrik saja tidak optimal, karena konsumsi satu pabrik sekitar 60 MMSCFD ditambah utilitas lainnya seperti listrik dan pemanas.

Sebetulnya, dari kebutuhan industri di Aceh dibandingkan dengan persediaan gasnya masih cukup besar. Ladang gas yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk keperluan pupuk ini

hanya sekitar 8-10%. Sisanya diekspor dalam bentuk LNG.

#### Renegosiasi

Ketentuan mengenai kewajiban para perusahaan migas untuk mengalokasikan sebagian produksinya kepada kebutuhan nasional sebenarnya telah diatur dalam pasal 22 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Namun, karena tidak ada peraturan pemerintah yang mengaturnya maka para perusahaan migas tidak menjalankan kewajiban itu. "Pemerintah mestinya dapat melakukan renegosiasi dengan perusahaan migas untuk mengalihkan sebagian supplainya ke Aceh," kata mantan Direktur Pertamina Effendi Situmorang.

Para perusahaan migas turut bertanggung jawab dalam penyediaan pasokan migas untuk kebutuhan dalam negeri. Selama ini mereka belum terikat dengan peraturan untuk mengalokasikan sebagian produksi mereka kepada kebutuhan dalam negeri.

Ketentuan itu diatur dalam PP No 35/2004 mengenai usaha di bidang hulu migas. Adapun bersamaan dengan PP 35 itu, pemerintah juga mengeluarkan PP No 36 mengenai usaha di bidang hilir migas.

Kontraktor bertanggung jawab untuk ikut memenuhi kebutuhan minyak bumi dan atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri," demikian tertulis dalam pasal 26 ayat 1 PP 35.

Adapun besaran kontribusi dari para perusahaan migas itu ditentukan secara prorata berdasarkan hasil produksi migas yang dihasilkan. Namun demikian, besaran kontribusinya ditetapkan maksimal 25% dari produksi migasnya.

Meskipun demikian, aturan mengenai kewajiban para perusahaan migas menyediakan pasokan migas nasional hanya mengikat pada perusahaan yang baru menandatangani kontrak. Sementara bagi perusahaan yang telah menandatangani kontrak lama tidak ikut. (Wis/Uud/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT <b>OKT</b> NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 <b>19</b> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 10	
TAHUN 2004	

■ Sektor Energi

## Indonesia Tingkatkan Kerjasama Energi dengan Produsen Minyak Venezuela

### Jakarta, NERACA

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Energi dan Pertambangan Venezuela sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang energi selain melalui mekanisme kerjasama G-15. Demikian antara lain hasil pertemuan antara delegasi DESDM yang diketuai oleh Staf Ahli Menteri Bidang SDM dan Teknologi dengan pejabat Kementerian Energi dan Pertambangan Venezuela seperti dikutip dalam siaran tertulis yang disampaikan melalui situs resmi Departemen ESDM kemarin.

Dalam penjelasan tersebut dikatakan, peluang kerjasama energi antara kedua negara cukup terbuka termasuk di bidang pertukaran tenaga ahli dan tenaga kerja selain di bidang investasi. Pihak Venezuela tertarik untuk mengirimkan stafnya untuk mempelajari berbagai aspek migas di Pusdiklat Migas Cepu.

"Pengembangan kerjasama bilateral antara RI dan Venezuela dapat merupakan landasan bagi mekanisme yang dapat menggerakkan kerjasama negara-negara G-15 dalam bidang energi. Sebagai reali-

sasi kerjasama tersebut, saat ini sedang disiapkan MOU kerjasama energi antara kedua negara," demikian penjelasan tertulis tersebut.

Dalam hal kerja sama bilateral di bidang energi sebelumnya dilakukan DESDM dengan Iran baru-baru ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yudiantoro waktu itu mengharapkan agar peluang kerjasama investasi dengan Iran bisa terus dijajagi dan ditindaklanjuti perusahaan-perusahaan perminyakan dan petrokimia Indonesia. "Saya optimis, kerjasama perminyakan kedua negara dapat direalisasikan mengingat Indonesia dan Iran merupakan anggota OPEC dan eratnya hubungan politik dan perdagangan antara kedua negara," kata Purnomo.

Seperti diketahui, salah satu hasil forum bilateral Komisi Ekonomi Bersama Indonesia-Iran adalah kesepakatan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara termasuk kerjasama di bidang minyak dan gas bumi. Sebagai negara produsen utama minyak bumi dunia, menurut Purnomo, prospek investasi di Iran sa-

ngat terbuka. "Demikian pula, Iran tertarik untuk melakukan kegiatan bisnis migas di luar negeri termasuk di Indonesia," tutur menteri.

Berkaitan dengan rencana Iran untuk melakukan investasi pengilangan minyak di Jawa Timur, Purnono menjelaskan bahwa Menteri Perminyakan Iran mengundang pejabat perminyakan Indonesia untuk mendiskusikan rencana tersebut. "Menteri Perminyakan Iran juga menyambut baik keinginan perusahaan-perusahaan perminyakan Indonesia untuk melakukan kerjasama investasi di bidang perminyakan, gas dan petrokimia di Iran," tutur Purnomo.

Kerja sama bilateral di bidang migas, menurut catatan *Neraca* juga pernah dilakukan Indonesia dengan Inggris untuk kegiatan penutupan lapangan migas di lepas pantai. Saat ini pemerintah memang sedang menyusun peraturan mengenai *de commissioning* (penutupan), yang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur atau peralatan yang digunakan pada lapangan-lapangan minyak dan gas, terutama yang berada di lepas pantai. (S1)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2004

■ Pertambangan

## LARI Minta SBY Tindaklanjuti Temuan Dugaan Korupsi di PLTPB Karaha Bodas

Jakarta, NERACA

Lembaga Advokasi Reformasi Indonesia (LARI) mengajukan temuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut kepada presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Purnomo Yusgiantoro dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Karaha Bodas. LARI meminta agar SBY menindaklanjuti temuan tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua LARI Eddy Sumarsono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, kemarin. Bukti-bukti yang dimiliki LARI diserahkan kepada SBY pada 11 Oktober 2004.

Eddy mengatakan, data-data yang dimiliki LARI itu membuktikan bahwa Purnomo Yusgiantoro ikut terlibat dalam dugaan korupsi proyek PLTPB Karaha Bodas, yang merugikan Pertamina dan PLN sebesar US\$ 261 juta. Kerugian tersebut berdasarkan hasil keputusan forum arbitrase, United Nations Commission on International Trade Law (Uncitral), di Jenewa, Swiss, 18 Desember 2000.

Tiga hari berikutnya, tepatnya 14 Oktober 2004, LARI kembali melayangkan surat ke SBY yang berisikan penolakan Purnomo dijadikan menteri pada kabinet mendatang. Pengajuan bukti-bukti yang dimiliki LARI kata Eddy, dimaksudkan agar SBY mempertimbangkan lagi pencalonan Purnomo untuk dijadikan menteri di kabinetnya.

Menurut dia, pengajuan teilah yang berjudul "Dugaan Korupsi dalam Proyek PLTPB Karaha Bodas, Serta Temuan Adanya Tindak Pidana dan Perdata, pada Konsorsium KBC" sejalan dengan pernyataan yang dikeluarkan SBY bahwa jika setiap warga negara yang memiliki bukti kejahatan yang dilakukan oleh calon menteri yang akan membantunya menjalankan pemerintahan dalam kabinet mendatang agar memberitahukan dan menyerahkan bukti itu kepadanya.

"Saya tidak pernah ragu bahwa Purnomo terlibat dalam dugaan korupsi PT Karaha Bodas Company (KBC), yang pada waktu itu menjabat sebagai konsultan dan tim teknis, dalam kategori sebagai

penganjur," ucap Eddy.

Dia menambahkan, Adnan Buyung Nasution selaku kuasa hukum Pertamina tidak banyak melakukan apa-apa dan Pertamina sendiri yang diberikan waktu 30 hari untuk mengomentari gugatan tersebut tapi tidak memberikan komentarnya.

Eddy mengungkapkan, pada 18 Desember 1989, berdasarkan Akta No. 30 dan Akta No. 26 tanggal 18 September 1990, yang dibuat kantor notaris Ny. Soenardi Adisasmito, diketahui Mariati Murman Heliarto menjabat Direktur Utama PT Nusantara Energy Prima dan Purnomo Yusgiantoro duduk sebagai direktur dan pemegang saham.

Namun dalam kesaksiannya kepada Mabes Polri, Purnomo mengaku tidak mengenal Mariati. Untuk itu, Eddy Soemarsono kepada wartawan menunjukkan bukti berupa foto Purnomo bersama Mariati di Cina dan Swiss.

Dalam menanggapi hasil keputusan arbitrase Uncitral di Jenewa, Swiss, pemerintah Indonesia melalui Dirut Pertamina Widya Purnama berketetapan menolak mematuhi

putusan lembaga arbitrase internasional Uncitral. Pasalnya, besarnya ganti rugi dinilai sangat tidak wajar. Poses persidangan dan putusan yang dilakukan majelis Arbitrase Uncitral dinilai banyak mengandung unsur kelemahan yang cukup mendasar. Status putusan arbitrase internasional itu merupakan keputusan terakhir serta bersifat mengikat para pihak (*final and binding*), dan tidak dapat diajukan banding.

Indikasi adanya korupsi menggunakan modus operandi *mark up* dalam proyek PLTPB Karaha Bodas yang dilaksanakan KBC nyata-nyata telah memenuhi unsur yang dikualifisir dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Demikian pula, indikasi korupsi terjadi, di balik kekalahan Pertamina dan PLN pada persidangan lembaga arbitrase internasional Uncitral, menghukum BUMN milik Indonesia harus membayar ganti rugi yang kini nilainya USD 299 juta. (re2/fjr)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN : 7 TAHUN 2004

# Harga Minyak Dunia Tembus 55 Dolar AS

## Diperkirakan Akan Terus Naik Hingga Akhir Tahun

SINGAPURA, (PR).-

Harga minyak dunia secara mengejutkan menembus 55 dolar AS per barel, Senin (18/10), di tengah ketidakpastian seputar kelebihan produksi, permintaan tinggi, dan cadangan global yang menipis.

Dalam perdagangan sesi siang kemarin, minyak mentah untuk pengantaran November di *New York Mercantile Exchange* (NYMC) sempat bertengger di harga 55,33 dolar AS. Angka ini naik 40 sen dibanding harga yang tercatat Jumat (15/10).

Harga tersebut mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan kenaikannya lebih tinggi dari 70% dibanding tahun lalu yang berada pada kisaran 25 dolar AS, atau masih di bawah puncak harga penyesuaian inflasi yang terjadi pada 1981.

Minyak mentah meroket lebih dari 10 dolar AS bulan lalu, terutama karena adanya penundaan produksi di Teluk Meksiko yang terke-

na amukan Topan Ivan, September.

Sekarang, angka psikologis 55 dolar AS telah terlewati. Hal ini membuat sejumlah analis memprediksi angkanya masih akan membubung hingga 60 dolar AS per barel. Sebagian memprediksi ini terjadi pada akhir tahun, saat pertengahan musim dingin di belahan bumi utara. "Harga 60 dolar AS sangat mungkin terjadi," ujar analis minyak pada konsultan energi Purvin & Gertz di Texas, Victor Shum.

Berkurangnya cadangan minyak di AS sebelum musim dingin tiba merupakan salah satu faktor pengguncang pasar. Departemen Energi AS dalam laporan cadangan minyak mingguan pekan lalu menyatakan, cadangan minyak komersial untuk pemanas berkurang 1,2 juta barel pada akhir pekan 8 Oktober. Total cadangan turun menjadi 50 juta barel atau 10% di bawah cadangan tahun lalu.

Akhirnya bahan bakar seperti kerosen digunakan sebagai peng-

ganti untuk pemanas. Padahal permintaan untuk bahan bakar yang dipakai pada pesawat jet (kerosen plus bahan adiktif) juga meningkat pada musim dingin karena jadwal penerbangan ditambah berkaitan dengan libur Natal.

*Minerals Management Service* AS dalam situsnya menyebutkan, pada saat upaya pemulihan tingkat produksi agar kembali ke normal terus berlanjut, lebih dari 20 juta barel minyak mentah tetap tidak bisa dipasarkan di Teluk Meksiko.

Namun, dengan kondisi jumlah kapasitas berlebih sekira 1% permintaan harian, yang perlu segera dipenuhi, yang kini diperkirakan di atas 82 juta barel, segala bentuk suplai diharapkan bisa mempengaruhi harga.

### Gangguan potensial

Para pelaku pasar sudah memperhitungkan berbagai gangguan potensial dalam produksi minyak, misalnya pemogokan pekerja perusahaan minyak dan ancaman se-

rangan pemberontak di Nigeria sebagai negara penghasil minyak terbesar di Afrika. Potensi gangguan lainnya adalah serangan sporadis yang dilakukan kelompok militan terhadap pipa-pipa minyak Irak dan ketidakpastian situasi di Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar dunia.

Selain itu masih ada sengketa pajak antara pemerintah Rusia dan perusahaan minyak raksasa Yukos, serta ketegangan politik yang memanas di Venezuela.

Sementara itu, *Chicago Board of Trade Chief Executive Bernard Dan* mengatakan kepada *Australia's Nine Network*, ekonomi AS akan sedikit terguncang, tapi masih mampu menghadapi harga minyak hingga 75 dolar AS. "Umumnya, pengguna dan penjual minyak sudah menargetkan harga minyak yang berkisar antara 60-75 dolar AS. Tapi rasanya itu tidak akan menimbulkan bencana untuk ekonomi AS," ujarnya. (AP/A-56)\*\*\*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 MAJALAH PILARS  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 25

TAHUN 2004

## Harga Minyak di Atas 55 dollar AS

SINGAPURA, SENIN — Harga minyak mentah dunia terus bergerak naik, dan menembus level 55 dollar AS per barrel di Singapura, hari Senin (18/10). Kekhawatiran pasokan minyak untuk musim dingin membuat harga minyak terus meningkat, sekalipun pasar juga terpengaruh pernyataan Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve) Alan Greenspan yang mengatakan harga minyak yang tinggi akan menekan tingkat permintaan di AS.

Harga minyak light sweet-minyak patokan di New York Mercantile Exchange (NYMEX) -di Singapura diperdagangkan pada 55,33 dollar AS per barrel, naik 40 sen dollar AS dari penutupan hari Jumat. Di London, minyak light sweet juga mencatat 55,33 dollar AS per barrel. Harga minyak sudah naik 68 persen dibanding posisi pada awal tahun 2004.

Sementara minyak brent north sea-minyak patokan di London-juga naik 47 sen menjadi 50,40 dollar AS per barrel. Akibatnya, minyak pemanas di AS juga mencatat rekor 1,5555 dollar AS per galon. Perkembangan harga minyak ini berkenaan dengan kekhawatiran pasokan minyak yang terganggu di musim semi.

Meski demikian, pasar juga tertahan akibat pernyataan Gubernur Bank Sentral AS Alan Greenspan bahwa harga minyak yang tinggi akan berkonsekuensi pada perekonomian AS. Ini akan menekan permintaan minyak AS karena perekonomian yang lesu.

"Sejauh tahun ini, naiknya nilai impor minyak AS-merupakan beban bagi warga AS -telah menekan 0.75 persen dari produk domestik kotor (PDB)," ujar Greenspan, hari Jumat.

Kalangan pasar mengemukakan, harga minyak saat ini tak stabil dan dalam enam bulan mendatang, harga minyak akan turun mendekati level fundamental 35 dollar AS hingga 40 dollar AS per barrel. (PPG)

14

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 4																																												
TAHUN 2004																																												

## Harga Minyak Mentah Lampau US\$ 55

Singapura - Harga minyak mentah melewati US\$ 55 per barel Senin (18/10) di saat awan ketidakpastian tetap menggayuti di seputar produksi, tingginya permintaan, dan ketatnya pasokan global.

Harga minyak untuk pengiriman November di New York Mercantile Exchange mencapai US\$ 55,02 per barel pada perdagangan pagi di Asia, naik 9 sen

dolar dari harga penutupan hari Jumat.

Meski harga-harga minyak masih lebih mahal 70 persen dibanding setahun lalu, harga-harga itu masih lebih rendah dibanding US\$ 25 per barel ketika puncak inflasi tahun 1981.

Harga minyak mentah itu melonjak hingga US\$ 10 pada bulan lalu, terutama karena lambannya pemulihan produk-

si di Teluk Meksiko sejak Badai Ivan melanda kawasan itu pada pertengahan September. Penurunan stok di Amerika Utara menjelang musim dingin ini juga ikut membuat goyang pasar.

Menurut Departemen Energi AS, dalam laporan pasokan minyak mingguan, ketersediaan pasokan minyak panas menurun 1,2 juta barel

pada 8 Oktober lalu hingga menjadi 50 juta barel, atau 10 persen di bawah situasi tahun lalu.

Namun, dengan kelebihan produksi dunia yang hanya 1 persen di atas permintaan harian, yang kini diperkirakan di atas 82 juta barel, gangguan pasokan sedikit saja akan sangat berdampak pada harga. (ap/xha)

15

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM										
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT <b>OKT</b> NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    17 18 <b>19</b> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 3										TAHUN 2004	

### Stok BBM Di Level 20 Hari

JAKARTA (Suara Karya): Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional saat ini berada pada level 20 hari kebutuhan atau berada dalam posisi aman sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat selama bulan puasa dan Lebaran Idul Fitri 1425 Hijriah. "Posisi stok tersebut diupayakan didistribusikan secara merata sesuai proporsi kebutuhan BBM setiap daerah," kata Pjs Manager Hubungan Pemerintah dan Kelembagaan Adiatma Sardjito dalam siaran persnya, Senin (18/10). Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan tidak terjadi kekosongan BBM di dalam negeri.

Menurut dia, kondisi stok saat ini hasil dari optimalisasi produksi kilang dan penambahan cadangan melalui program impor. Oleh karena itu, imbuhnya, Pertamina tetap menjamin kelancaran distribusi BBM di dalam negeri dengan tingkat harga yang berlaku saat ini meskipun harga minyak mentah dunia telah mencapai level tertinggi di atas 50 dolar AS per barel.

Dikatakannya, secara nasional kebutuhan harian untuk BBM mencapai 178 kilo liter dengan kebutuhan terbesar adalah solar sebesar 74 ribu kilo liter dan Pre-

mium 44 ribu kilo liter. Khusus untuk Minyak tanah dengan tingkat konsumsi 32 ribu kilo liter per hari, secara nasional stoknya mencapai 27 hari atau sangat aman.

Menurutnya, konsumsi terbesar masih didominasi wilayah pemasaran III (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten) dengan kebutuhan harian mencapai 54 ribu kilo liter. Disusul wilayah V (Jawa Timur, Bali, NTT, NTB) sebesar 35 ribu kiloliter dan wilayah I (Nagroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Riau) sebesar 25 ribu kilo liter per hari.

"Selama bulan puasa, menjelang dan setelah Lebaran, Pertamina telah membentuk satuan tugas khusus (satgas) BBM di tingkat Pusat maupun di Unit-unit pemasaran, operasi kilang dan perkapalan untuk memantau persediaan dan distribusi BBM di dalam negeri," tegasnya.

Terkait dengan kelancaran pasok, Pertamina juga mengharapkan kerjasama masyarakat untuk melaporkan kepada aparat kepolisian apabila ditemui adanya tindak penyalahgunaan atau kecurangan dalam distribusi BBM, khususnya untuk yang bersubsidi (GW-1).

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

# Stok BBM Mencukupi

Pertamina menjamin kelancaran distribusi selama Ramadhan dan Lebaran.

JAKARTA — Stok bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini berada pada level 20 hari kebutuhan atau berada dalam posisi aman. Stok itu cukup untuk kebutuhan masyarakat selama bulan puasa dan Lebaran Idul Fitri 1425 H.

"Posisi stok tersebut diupayakan didistribusikan secara merata sesuai proporsi kebutuhan BBM setiap daerah," kata Pjs Manager Hubungan Pemerintah dan Kelembagaan, Adiatma Sardjito, di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan tidak terjadi kekosongan BBM di dalam negeri. Menurut dia, kondisi stok saat ini merupakan hasil dari optimalisasi produksi kilang dan penambahan cadangan melalui program impor. Oleh karena itu, Pertamina tetap menjamin kelancaran distribusi BBM di dalam negeri dengan tingkat harga yang berlaku saat ini meskipun harga minyak mentah dunia telah mencapai level tertinggi di atas 50 dolar AS per barel.

Ia menyebutkan secara nasional kebutuhan harian untuk BBM mencapai 178 kiloliter dengan kebutuhan terbesar adalah solar 74 ribu kiloliter dan premium 44 ribu kiloliter. Khusus untuk mi-

nyak tanah dengan tingkat konsumsi 32 ribu kiloliter per hari, secara nasional stoknya mencapai 27 hari atau sangat aman. Konsumsi terbesar masih didominasi wilayah pemasaran III (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) dengan kebutuhan harian mencapai 54 ribu kiloliter. Disusul wilayah V (Jawa Timur, Bali, NTT, NTB) sebesar 35 ribu kiloliter dan wilayah I (Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Riau) sebesar 25 ribu kiloliter per hari.

Selama bulan puasa, menjelang dan setelah Lebaran, Pertamina telah membentuk satuan tugas khusus (satgas) BBM di tingkat pusat maupun di unit-unit pemasaran, operasi kilang dan kapal untuk memantau persediaan dan distribusi BBM di dalam negeri.

Terkait dengan kelancaran pasok, Pertamina juga mengharapkan kerja sama masyarakat untuk melaporkan kepada aparat kepolisian apabila ditemui adanya tindak penyalahgunaan atau kecurangan dalam distribusi BBM, khususnya untuk yang bersubsidi. "Langkah ini sangat diperlukan agar kebutuhan masyarakat tercukupi dan terhindar dari tin-

dakan spekulasi yang merugikan," katanya.

## Langka

Pernyataan stok BBM cukup aman ternyata tidak terbukti di lapangan. Persediaan BBM berupa minyak tanah mulai langka di Kota Bengkulu, menyebabkan terjadinya antrean panjang di beberapa pangkalan.

Di beberapa pangkalan minyak tanah terlihat antrean panjang warga yang ingin membeli minyak dan setiap pembeli hanya diperkenankan membeli maksimal sebanyak 20 liter. Halim, warga Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, Senin, mengaku sudah dua hari berkeliling mencari minyak tanah untuk isi warungnya, dan setiap pangkalan lebih mengutamakan kebutuhan warga di sekitarnya.

Ia menambahkan harga minyak tanah yang biasanya dijual Rp 1.200/liter terpaksa dinaikkan menjadi Rp 1.300/liter. Siti, seorang warga di Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, mengaku mulai menggunakan bahan bakar kayu untuk memasak. Harga kayu di Kota Bengkulu akhir-akhir ini juga naik dari Rp 1.500/ikat (seberat 5 kg) menjadi Rp 1.800/ikat.

Kepala Disperindag Kota Bengkulu, Zainal Jambak, secara terpisah mengatakan stok minyak tanah untuk Kota Bengkulu masih men-

cukupi, antrean di pangkalan minyak tanah terjadi karena adanya isu pasokan minyak tanah mulai berkurang.

Untuk meminimalisasi ke-langkaan minyak tanah menjelang Lebaran, pihak Disperindag telah bekerja sama dengan Pertamina P. Baai untuk mengadakan operasi pasar sebanyak 20 ton/hari.

## Harga minyak 55 dolar AS

Harga minyak mentah terus meningkat mencapai rekor baru di atas 55 dolar per barel di perdagangan Asia karena kekhawatiran kekurangan pasokan terus berlanjut mendominasi pasar.

Pada pukul 11.10 am (0310 GMT), minyak mentah utama New York light sweet kontrak pengiriman November pada posisi 55,22 dolar per barel, naik dari penutupan Jumat lalu 54,93 dolar per barel.

Daniel Hynes, analis industri perminyakan dengan ANZ Bank di Australia, mengatakan bahwa data yang dikeluarkan minggu lalu menunjukkan bahwa pasokan minyak pemanas komersial menurun di Amerika Serikat.

Ia mengatakan bahwa dengan tidak adanya perubahan lain mengenai masalah pasokan, Hynes memprediksi bahwa harga minyak akan tetap berkisar pada tingkat yang sekarang sampai akhir pekan ini. ■ ant/flr

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td> <td style="width: 10%;">FEB</td> <td style="width: 10%;">MAR</td> <td style="width: 10%;">APR</td> <td style="width: 10%;">MEI</td> <td style="width: 10%;">JUN</td> <td style="width: 10%;">JUL</td> <td style="width: 10%;">AGST</td> <td style="width: 10%;">SEPT</td> <td style="width: 10%; border: 2px solid black; border-radius: 50%;">OKT</td> <td style="width: 10%;">NOV</td> <td style="width: 10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td style="border: 2px solid black; border-radius: 50%;">19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 5										TAHUN 2004																																		

## Stok BBM Selama Ramadhan dan Idul Fitri Aman

JAKARTA (Media): Stok bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini berada pada level 20 hari kebutuhan atau berada dalam posisi aman sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat selama bulan puasa dan Idul Fitri 1425 Hijriah.

"Posisi stok tersebut diupayakan didistribusikan secara merata sesuai proporsi kebutuhan BBM setiap daerah," kata Pjs Manajer Hubungan Pemerintah dan Kelembagaan PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kekosongan BBM di dalam negeri. Kondisi stok saat ini merupakan hasil dari optimalisasi produksi kilang dan penambahan cadangan melalui program impor.

Oleh karena itu, Pertamina tetap menjamin kelancaran distribusi BBM di dalam negeri de-

ngan tingkat harga yang berlaku saat ini meskipun harga minyak mentah dunia telah melebihi level US\$50 per barel.

Di pasar Asia, kemarin, harga minyak menembus US\$55 per barel.

Adiatma menyebutkan secara nasional kebutuhan harian untuk BBM mencapai 178 kiloliter dengan kebutuhan terbesar adalah solar sebesar 74 ribu kiloliter dan Premium 44 ribu kiloliter.

Khusus untuk minyak tanah dengan tingkat konsumsi 32 ribu kiloliter per hari, secara nasional stoknya mencapai 27 hari atau sangat aman.

Konsumsi terbesar masih didominasi wilayah pemasaran III (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) dengan kebutuhan harian mencapai 54 ribu kiloliter.

Disusul wilayah V (Jawa Timur, Ba., NTT, NTB) sebesar 35 ribu kiloliter dan wilayah I (Nanggroe Aceh Darussalam, Su-

matra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Riau) sebesar 25 ribu kiloliter per hari.

Selama bulan puasa, menjelang dan setelah Lebaran, Pertamina telah membentuk satuan tugas khusus (satgas) BBM di tingkat pusat maupun di Unit-unit pemasaran, operasi kilang dan perkapalan untuk memantau persediaan dan distribusi BBM di dalam negeri.

Terkait dengan kelancaran pasok, Pertamina juga mengharapkan kerja sama masyarakat untuk melaporkan kepada aparat kepolisian apabila ditemui adanya tindak penyalahgunaan atau kecurangan dalam distribusi BBM, khususnya untuk yang bersubsidi.

"Langkah ini sangat diperlukan agar kebutuhan masyarakat tercukupi dan terhindar dari tindakan spekulasi yang merugikan," papar Adiatma.

(Ant/AFP/E-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2004

## RI opens fuel retail market

Indonesia opened up its fuel retailing industry by allowing international companies including Malaysia's Petroliam Nasional Bhd. to import and sell oil products, the Energy and Mineral Resources Ministry said.

The regulation was signed by President Megawati Soekarnoputri on Oct. 14 and effective immediately, the ministry said in a statement.

The ministry has the authority to decide the "type, the standard and the quality of the fuel sold", it says.

Indonesia ended state-owned PT Pertamina's monopoly on fuel sales last year. The Energy Ministry

then issued licenses to non-state companies to sell fuel in the country, with the licenses effective once the regulation was put in place on Oct. 14.

A unit of Petroliam Nasional, or Petronas as Malaysia's state-owned oil and gas company is known, was among the companies that won a license to import and sell fuel in Indonesia, Bisnis Indonesia reported on Aug. 9, citing Faris Mustafa, a Petronas senior official.

PetroChina Co., Total SA, and BP Plc were among the companies seeking licenses to sell fuel in Indonesia, BPHilir Migas, an Indonesian oil and gas regulator, said last year. — Bloomberg

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN    FEB <b>MAR</b> APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT <b>OKT</b> NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    17 18 <b>19</b> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 12	TAHUN 2004

## Kekurangan Gas Di Aceh, Titik Tolak Kesemrawutan Kebijakan Gas Nasional

JAKARTA (Suara Karya): Masalah kekurangan gas di Aceh merupakan salah satu titik tolak utama akan kesemrawutan kebijakan migas nasional. Untuk mengatasinya diperlukan solusi yang bijaksana dengan berpegang pada kepentingan kebutuhan domestik.

"Masalah kekurangan gas di NAD untuk kebutuhan PIM dan AAF menurut saya sangat memprihatinkan karena seharusnya persoalan ini tidak muncul kalau rekomendasi yang telah dibuatkan *Management Production Sharing* dua tahun lalu ditindaklanjuti dengan konsekuen," kata pengamat Perminyakan Effendi Situmorang di Jakarta, kemarin.

Mantan Direktur Pengembangan Pertamina ini mengatakan, dengan melihat dari sudut pandang bisnis, kebijakan dan operasional, prioritas pemanfaatan gas sebenarnya harus untuk

dalam Negeri sesuai dengan UUD dan juga ditegaskan dalam UU Migas No. 22 tahun 2001 pasal 8. Hanya saja UU Migas tersebut menjadi tidak konsisten karena salah satu pasalnya, kalau tak salah pasal 22 ayat 1 dan 2 tidak mendukung dan tidak konsisten akan prinsip prioritas tersebut. "Ini adalah salah satu titik tolak utama akan kesemrawutan dalam kebijakan Migas nasional," katanya.

Ia mengakui, sebagai solusi yang paling cepat untuk NAD adalah tetap memberikan pasokan gas untuk kebutuhan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM), sedangkan pabrik pupuk ASEAN (AAF), sesuai dengan prinsip optimisasi yang berorientasi ekspor dapat diberikan prioritas yang terakhir.

"Pasokan gas ke PIM dilihat secara makro nasional yaitu mana yang lebih efisien antara PIM dan

Kaltim dan saya yakin pasti PIM lebih efisien kalau dibandingkan dengan Kaltim eks Pertamina," katanya.

Dari segi operasionalnya, gas yang selama ini dipasok oleh ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) di NAD bisa tetap diberikan ke PIM dan kewajiban pasokan LNG untuk KOGAS dan Arun dialihkan ke Bontang. "Di Kalimantan perlu dilakukan dua hal yaitu hentikan suplai ke pabrik pupuk Kaltim I dan bangun Train I dengan segera tanpa menunggu ada pasar tambahan atau keekonomian," cetusnya.

Ia menilai pengembangan train I akan lebih efektif dan merupakan solusi yang cepat bila dibandingkan dengan pengembangan Tangguh yang terkenal mahal. Bahkan gas Pertamina di Donggi sebenarnya jauh lebih *attractive* dibandingkan Tangguh. Sebenar-

nya hal ini sangat membantu PIM di NAD kalau dilakukan segera.

Dengan demikian pada saat yang sama perpanjangan kontrak untuk Arun II ke Jepang sebaiknya dinegosiasikan untuk tak diteruskan oleh EMOI karena memang belum ada persetujuan yang disepakati. Disamping itu pasokan ke Korea sebaiknya dikurangi. "Dengan strategi operasional ini, untuk jangka pendek masalah pasokan gas ke PIM dapat diberikan," katanya.

Pada bagian lain ia menjelakan, untuk jangka panjang perlu dikembangkan Blok A dengan segera di mana cadangannya cukup untuk memasok gas selama lima tahun bagi dua pabrik pupuk di NAD. Pasalnya, berdasarkan pengalaman, ia yakin bahwa EMOI pasti bisa menerima *arrangement value retention* kalau memang harus dilakukan. (CW-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 MAJALAH PILARS  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 5 TAHUN 2004

**PetroChina akan akuisisi aset CNPC**

HONG KONG (Bloomberg): PetroChina Co akan mengeluarkan dana US\$5 miliar untuk mengakuisisi ladang migas milik perusahaan induknya China National Petroleum Corp (CNPC) di luar negeri, demikian dilaporkan *Hong Kong Economic Times*, mengutip satu sumber.

Menurut sumber tadi, CNPC dan PetroChina mengontrol aset migasnya di luar negeri secara terpisah. CNPC, tulis harian berbahasa mandarin itu, mengoperasikan ladang minyak di Sudan, Indonesia, dan Venezuela. Perusahaan ini menguasai sekitar 90% saham PetroChina yang tercatat di bursa Hong Kong.

Kedua perusahaan ini tengah membicarakan penggabungan aset minyaknya di luar negeri dan menjual saham ke publik melalui pembentukan perusahaan baru.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, PetroChina memiliki saham dan menjadi operator di sejumlah lapangan migas di Indonesia. Tidak hanya dalam kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) yang dimiliki PetroChina, kerja sama dalam bentuk *joint operation agreement* (JOA) dan *joint operation body* (JOB) juga dimiliki BUMN China tersebut.

Di blok Kepala Burung, daratan Papua yang sudah berproduksi, misalnya, PetroChina menjadi operator dengan menguasai 30% saham di blok tersebut. (zuf)

21

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																																											
<b>KODE :</b> <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">JAN</td> <td style="text-align: center;">FEB</td> <td style="text-align: center;">MAR</td> <td style="text-align: center;">APR</td> <td style="text-align: center;">MEI</td> <td style="text-align: center;">JUN</td> <td style="text-align: center;">JUL</td> <td style="text-align: center;">AGST</td> <td style="text-align: center;">SEPT</td> <td style="text-align: center;">OKT</td> <td style="text-align: center;">NOV</td> <td style="text-align: center;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
<span>HALAMAN : 2</span> <span>TAHUN 2004</span>																																												

### Minyak Mahal, Ganti Biodiesel

Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai, revisi total RAPBN 2005 wajib dilakukan karena banyak asumsi tidak tepat yang diusulkan pemerintahan yang lama. Asumsi tersebut adalah asumsi harga minyak dan nilai tukar

rupiah. "Menteri ESDM Purnomo (Yusgiantoro) mengasumsikan harga minyak akan turun, faktanya harga minyak terus naik sampai di atas US\$ 50 per barel," katanya (*Tempo Interaktif*, 13 Oktober).

Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai banyak jenis tanaman berpotensi sebagai pengganti BBM (fosil). Sebagai contoh negara dunia ketiga seperti Brasil dan India sudah memakai sumber energi nabati (etanol) alternatif ini. Uni Eropa dimotori oleh Jerman juga sudah lama mempunyai "pompa bensin" biodiesel. Bahkan sebenarnya Tuan Diesel, penemu mesin diesel, merancang mesin dieselnya memakai bahan bakar minyak nabati.

Negeri kita bisa memulai perkebunan "biodiesel" dengan menanam jagung, kelapa, jarak, dan sejenisnya sebagai sumber energi. Semoga Pak SBY mau melihat potensi energi alternatif ini.

**Tan D.J.**

Medan, Sumatera Utara

E-mail: permakultur\_indonesia@yahoo.com

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 MAJALAH PILARS  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3.8

TAHUN 2004

## Konsumen tumpuk stok, harga minyak bumi US\$55,33

SINGAPURA (Bloomberg): Harga kontrak berjangka minyak bumi mentah awal pekan ini lampau rekor US\$55 per barel di New York pekan lalu.

Kontrak penyerahan November meningkat US\$0,40 atau 0,7% dan menyentuh US\$55,33 per barel dalam perdagangan elektronik di New York Mercantile Exchange kemarin.

Harga minyak global terus meningkat di 19 dari 22 sesi, dan pada level paling tinggi sejak kontrak di Nymex memulai perdagangannya pada 1983.

Sementara posisi tertinggi di London yang sempat tercatat sepanjang perdagangan kemarin adalah US\$54,85 pada 11:55 waktu London.

Kontrak *Brent crude oil* Desember meningkat US\$0,47 menjadi US\$50,40 per barel, tertinggi untuk kontrak Desember, sementara kontrak November yang sudah jatuh tempo sempat menyentuh rekor US\$51,50 pada 12 Oktober.

Terus merosotnya perse-

diaan *heating oil* dinilai telah mendorong konsumen untuk membeli stok musim dingin lebih awal dari biasanya.

Data persediaan bahan bakar distilasi di AS merosot 2,5 juta barel dalam sepekan yang berakhir 8 Oktober, ujar pemerintah pekan lalu.

Angka itu lebih rendah 2,5 kali dari yang diperkirakan analis. Komponen *heating oil* dari pasokan distilasi menurun hingga 1,2 juta barel menjadi 50 juta barel, 14% di bawah rata-rata lima tahun.

Christopher Bellew, pialang di Prudential Bache International Ltd. di London, mengatakan menguatnya harga terjadi akibat cuaca yang lebih dingin disertai rendahnya persediaan, khususnya produk rafinasi seperti *heating oil*.

"Ini berlanjut sejak publikasi angka persediaan distilasi AS pekan lalu."

Harga minyak telah melonjak 80% pada tahun lalu dipicu menguatnya permintaan global dipimpin China.

Ke-11 negara pengekspor minyak (OPEC) menyatakan

telah memompa mendekati angka maksimum. Kalangan pedagang prihatin akan potensi terjadinya kelangkaan pasok dari Irak, Rusia, Nigeria, atau lainnya.

OPEC, yang memompa lebih dari sepertiga minyak dunia, telah memacu produksi ke posisi tertingginya selama 25 tahun dan merevisi naik pertumbuhan permintaan 2004, namun memangkas estimasi perkiraan pertumbuhan 2005.

"Perkiraan pertumbuhan permintaan minyak dunia 2004 telah mengalami revisi jauh ke atas yaitu 110.000 bph, menjadi 2,6 juta bph, karena lebih menguatnya ekspansi tahun ini dari perkiraan ekspansi ekonomi dunia," ungkap OPEC melalui laporan pasar minyak bulannya.

Perkiraan pertumbuhan konsumsi minyak 2005 telah direvisi hingga 130,00 bph menjadi 1,61 juta bph, ungkap laporan itu. OPEC juga menaikkan produksi 430.000 bph pada September menjadi 30,12 juta bph, tambah laporan itu. (roy)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2004

# Asian stock markets close mostly lower on oil prices

Associated Press  
Hong Kong

Asian stock markets closed mostly lower on Monday, pushed down largely by concerns about the surge in oil prices.

Tokyo's Nikkei Stock Average of 225 issues slipped 17.33 points, or 0.16 percent, to 10,965.62. The index has now declined 419.76 points, or 3.69 percent, over the last seven trading days.

Investors sold high-technology issues such as Canon and Ricoh amid uncertainty before the release of earnings reports scheduled for IBM and Texas Instruments on Monday and for Microsoft on Thursday, traders said.

Investors were also jittery over the continuing surge in oil prices and the outcome of the U.S. presidential election in early November.

Crude for November delivery on the New York Mercantile Exchange hit US\$55.33 per barrel in Asian trading Monday, up 40 cents from its

Friday settlement price.

The dollar bought ¥109.21 on Monday, down 0.43 yen from late on Friday in Tokyo but above the ¥09.17 it bought in New York later that day.

Stock prices opened higher as investors welcomed Wall Street's moderate gains on Friday, but fell back on continuing concerns that higher oil prices could hurt the global economy.

The index of all issues on the Tokyo Stock Exchange's first section fell 4.28 points, or 0.39 percent, to 1,101.11 points Monday. The TOPIX lost 4.25 points, or 0.38 percent, Friday.

In New York Friday, U.S. stocks rose as a stronger-than-expected retail sales report showed that higher oil prices weren't scaring consumers away from spending.

In Tokyo currency dealings, the euro rose to US\$1.2482 Monday afternoon from US\$1.2390 late on Friday. Against the yen, the euro was up at ¥136.35 from ¥135.80.

In Hong Kong, the key

Hang Seng Index fell 24.46 points, or 0.2 percent, to 13,034.74. The index gained 24.05 points, or 0.2 percent, on Friday.

Brokers said there was selective selling after crude oil prices rose past US\$55 per barrel.

In currency trading, the U.S. dollar was quoted at 109.28 yen, down 0.36 yen from late Friday in Tokyo but above the 109.17 yen it bought in New York later that day.

Elsewhere in Singapore, shares closed lower on concerns about rising oil prices. The Straits Times Index fell 11.99 points, or 0.6 percent, to 1,950.55.

In Taipei, Taiwan shares closed lower for a seventh straight session on concerns about the impact of high oil prices on earnings in the coming year. The Weighted Price Index fell 48.70 points, or 0.8 percent, to 5,772.12.

In Manila, Philippine shares closed higher, boosted by Wall Street's advance on Friday. The 30-company

Philippine Stock Exchange Index rose 8.57 points, or 0.5 percent, to 1,789.98.

In Sydney, Australian shares closed lower. The benchmark S&P/ASX 200 Index fell 10.7 points or 0.3 percent, to 3,709.80.

In Seoul, South Korean shares closed higher, snapping a seven-session losing streak. The Korea Composite Stock Price Index, or Kospi, rose 6.33 points, or 0.8 percent, to 848.27.

In Kuala Lumpur, Malaysian shares closed slightly higher. The Composite Index of 100 blue chip stocks rose 0.40 points, or 0.1 percent, to 851.69.

In Bangkok, Thai shares closed slightly lower after concerns over rising oil price erased early gains. The Stock Exchange of Thailand Index fell 1.97 points, or 0.3 percent, to 646.51.

In Wellington, New Zealand shares closed slightly lower. The NZSX-50 Gross Index fell 0.49 point, or 0.01 percent, to 2,836.74.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 MAJALAH PILARS  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN: 1 TAHUN 2004

## Crude oil price surges past US\$55

Associated Press  
London

Crude oil prices surged past an unprecedented US\$55 per barrel on Monday as uncertainty swirls over production, high demand and tight global supplies ahead of the Northern Hemisphere winter.

Crude for November delivery on the New York Mercantile Exchange hit US\$55.33 per barrel in pre-opening electronic trading, up 40 cents from its Friday settlement price. By 1330GMT (8.30 p.m. Jakarta time) the contract had slipped back to US\$54.75, down 18 cents. The November contract expires Wednesday.

Heating oil also hit a new peak Monday, while Brent crude for December delivery hit a high of US\$50.32 on London's International Petroleum Exchange shortly after the trading session opened. By 1330GMT, Brent also had pulled back, down 13 cents from Friday's close to US\$49.80.

However, analysts said the markets were volatile, recording large price swings over a weekly period, and prices are expected to rise again.

Crude oil prices are the highest in a generation, rising by around 80 percent from the beginning of 2004. However, even at current levels, crude oil prices are still about 40 percent below the all-time highs - in inflation-adjusted terms - of February 1981.

Prices have skyrocketed more than US\$10 in the past month, primarily over production delays in the Gulf of Mexico, where Hurricane Ivan hit mid-September.

Now that the US\$55 barrier has been surpassed, analysts are looking toward US\$60 a barrel, with some saying it may reach that mark by the end of the year - smack in the middle of the Northern Hemisphere winter.

"We hit the new milestone and we're looking at US\$60," said Victor Shum, oil analyst at Texas-headquartered energy consultants Purvin & Gertz. "US\$60 is certainly feasible."

Axel Busch, the chief correspondent for Energy Intelligence Group in London, which plots energy developments, said the market was a little overheated and would likely pull back initially.

"But will we hit US\$60? Yes, I think we probably will," he added.

Declines in U.S. distillate stocks just before the Northern Hemisphere winter are the latest in a line of supply factors to rattle the market.

The U.S. Energy Department said in its weekly petroleum supply report last week that commercially available supplies of heating oil declined by 1.2 million barrels for the week ending Oct. 8, falling to 50.0 million barrels, or 10 percent below year-ago levels.

25

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 6																																												
TAHUN 2004																																												

# Produsen Pupuk Minta Penjadwalan Ulang Pasokan Gas

JAKARTA — Sejumlah produsen pupuk meminta pemerintah melakukan penjadwalan ulang pasokan gas ke pabrik pupuk dalam negeri. Penjadwalan itu penting dilakukan guna memenuhi kekurangan pasokan gas yang terjadi saat ini.

Direktur PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Hidayat Nyamat mengatakan, PT Arun LNG yang selama ini menjadi pemasok utama gas lebih memprioritaskan distribusinya untuk kegiatan ekspor. Padahal, dalam saat bersamaan sejumlah pabrik pupuk yang menggunakan gas se-

bagai bahan baku utama mengalami kekurangan pasokan.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus meminta Arun LNG untuk mulai merelokasi pasokan gasnya ke pabrik pupuk dalam negeri, termasuk untuk pabrik PIM I dan PIM II. "Kami harapkan mereka (segera) melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) pasokan gasnya," kata Hidayat kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Hidayat menjelaskan, kebutuhan PIM saat ini mencapai 110 juta *metres standard cubic feet day*/mmscf). Sedangkan pa-

sokan yang tersedia saat ini baru mencapai 57 mmscf. "Akibatnya, kami hanya (bisa) mengoperasikan satu pabrik."

Dia juga mengungkapkan, dari satu pabrik itu, kapasitas produksinya juga belum bisa maksimal. Pasalnya, pasokan gas yang ada hanya bisa memenuhi kebutuhan 80 persen, karena 20 persen sisanya harus dikirimkan ke PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), yang sedang dalam perbaikan.

Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) Omay Kawiraatmadja juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut

dia, sebagai industri strategis yang bertugas memenuhi kebutuhan petani, pemerintah perlu menetapkan pabrik pupuk dalam industri yang harus mendapatkan prioritas pasokan gas.

"Itu penting dilakukan, karena jika Pupuk Kaltim menghentikan kegiatan operasinya, akan terjadi kekurangan pasokan 1,2 juta ton urea," katanya.

Seperti diketahui, saat ini terjadi kekurangan pasokan gas bumi untuk tiga pabrik pupuk yaitu PIM I, PIM II, dan AAF. Akibat kondisi itu, pemerintah telah memutuskan menutup pabrik pupuk AAF.

Selama ini kebutuhan gas bumi dipasok dari lapangan gas Arun. Belakangan, cadangan gas di lapangan itu semakin menipis. Alternatifnya, pemerintah berniat mengembangkan lapangan gas marginal Blok A, di Lhokseumawe, yang memiliki cadangan sekitar 560 miliar kaki kubik. Tapi hingga kini lapangan itu belum bisa dikembangkan. Karena belum tercapainya komposisi bagi hasil antara pemerintah dan Conoco-Phillips, sebagai kontraktornya.

Hidayat menambahkan, usulan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M.S. Soewandi yang mengatakan agar kekurangan gas itu diambil dari luar negeri, tidak mudah dilaksanakan. Sebab, dengan membeli gas di pasar internasional yang harganya mencapai US\$ 2,2 MMBtu (*million british thermal units*) akan membuat harga jual pupuk menjadi mahal.

Padahal, menurut dia, harga rata-rata pupuk saat ini hanya berkisar US\$ 1,5-2. "Seandainya dipaksakan dengan harga di atas US\$ 2,2, petani tidak akan mampu untuk membelinya," ujarnya.

## MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 MAJALAH PILARS  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T. 7

TAHUN 2004

## AAF belum dapat pahami keputusan penutupan pabrik

JAKARTA (Bisnis): PT Asean Aceh Fertilizer belum dapat menerima keputusan pemerintah atas penutupan pabrik pupuk itu, sementara tingginya harga pupuk di pasar internasional hingga US\$200 per ton diyakini dapat memberi keuntungan hingga US\$37 juta jika perusahaan itu tetap beroperasi.

Direktur Utama PT AAF Rauf Purnama mengatakan pemerintah hingga sekarang dinilai belum dapat memberikan alasan yang tepat mengenai penutupan pabrik AAF.

Menurut dia, seharusnya pemerintah membicarakan putusan penutupan itu langsung dengan para pemegang saham dan bukan diputuskan melalui rapat kabinet terbatas seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.

"Dalam rapat kabinet terbatas diputuskan bahwa PT AAF akan ditutup dan akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah negara asing lainnya, langkah yang diambil tersebut merupakan hal yang tidak lazim dilakukan," ujarnya kemarin.

Menurut dia, Indonesia bukanlah pemegang saham 100% oleh karena itu seyogyanya penutupan perusahaan dilakukan oleh anggota pemegang saham dalam RUPS.

AAF merupakan perusahaan pupuk yang dimiliki oleh beberapa negara Asean di mana pemerintah Indonesia hanya menguasai saham 60%, Thailand 13%, Filipina 13%, Malaysia 13% dan Singapura 1%.

Rauf menerangkan selain itu, hingga kini manajemen AAF juga belum mendapatkan alasan yang jelas mengenai keputusan itu. Pemerin-

tah semestinya segera melayangkan surat kepada pemegang saham yang menyatakan bahwa pasokan gas sudah tidak ada, atau gas ada tetapi diperuntukkan bagi ekspor.

"Dengan penjelasan itu maka pemegang saham akan mengerti tanpa harus mengatakan bahwa PT AAF sudah tidak efisien karena berusia tua terlebih lagi sampai harus melakukan audit teknologi, apalagi masih ada pabrik pupuk lain yang usianya lebih tua," tuturnya.

### Masih efisien

Dia mengatakan pabrik AAF masih dapat beroperasi secara efisien dibandingkan dengan pabrik seumurnya, di mana pemakaian gas alam masih dapat dipertahankan sebesar 33 MMBTU per ton urea, dibandingkan misalnya pabrik pupuk Kaltim I yang mencapai 37 per MMBTU.

Alasan pemerintah yang menyatakan bahwa usia pabrik PT AAF yakni mencapai 20 tahun dapat menyebabkan inefisiensi, kata dia, bukanlah pernyataan yang tepat, karena beberapa pabrik seperti PT Pusri II bahkan sudah berusia 30 tahun, Pusri III 28 tahun, Pusri IV 27 tahun, Pupuk Kujang 26 tahun dan Pupuk Kaltim I berusia 25 tahun ternyata dapat memproduksi dengan baik.

"Bahkan manajemen AAF berkeyakinan bahwa pabriknya masih dapat beroperasi dengan baik untuk jangka waktu 10 tahun lagi jika mendapatkan kepastian pasokan gas," ujarnya.

Rauf mengatakan permasalahan utama yang dihadapi oleh PT AAF dan juga PT

PIM adalah merupakan akibat dari kesalahan dalam pengaturan penjualan LNG. Kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan pasar ekspor mempunyai dampak signifikan bagi kinerja industri dalam negeri.

Dia mengatakan pihaknya sangat mengharapkan pemerintah yang baru agar mengutamakan kepentingan industri nasional daripada ekspor, karena nilai tambah yang diperoleh jauh lebih tinggi.

Dengan terus memproduksi pupuk, lanjut dia, maka nilai tambah yang dapat diperoleh dengan nilai jual saat ini mencapai US\$200 per ton dikali dengan produksi PT AAF sebanyak 600.000 ton adalah sekitar US\$120 juta.

Dibandingkan dengan nilai jual gas sebanyak 19,8 juta MMBTU (yang dipergunakan untuk memproduksi 600.000 ton urea) dikalikan dengan nilai jual US\$3,2 per MMBTU adalah US\$63,36 juta. "Dengan demikian, perolehan devisa juga lebih menguntungkan."

Menurut Rauf, dengan harga jual pupuk internasional yang mencapai US\$200 per ton, maka AAF sanggup untuk membeli harga gas sebesar US\$2,33 per MMBTU, karena masih ada margin keuntungan.

"Biaya produksi untuk menghasilkan satu ton urea mencapai US\$140 sementara harga jual di pasar internasional mencapai US\$200 per ton, maka untuk satu ton PT AAF keuntungan yang diraih yaitu US\$60 dikali dengan 600.000 ton maka satu tahun laba yang dicapai yaitu mencapai US\$36 juta," ungkapnya. (rni)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT <b>OKT</b> NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 <b>19</b> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 12	
TAHUN 2004	

Akibat Pasokan Gas Terbatas

**Pabrik Pupuk Diminta Kurangi Ekspor**

JAKARTA (Suara Karya): Meski pasokan gas ke pabrik pupuk mengalami keterbatasan, pemerintah meminta pabrik pupuk mengurangi volume ekspor untuk mengamankan pasokan dalam negeri minimal hingga musim tanam awal tahun depan.

Dirjen Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Dopperindag), Benny Wahyudi, mengatakan, secara keseluruhan pasokan gas untuk seluruh pabrik pupuk yang ada mengalami pengurangan. Rata-rata, setiap pabrik hanya terpenuhi sekitar 80 persen dari kapasitas produksinya.

"Saat ini, produksi di seluruh pabrik pupuk terkendala pada pasokan gas. Namun untuk pasokan dalam negeri masih mencukupi sehingga yang terkena imbas hanya pengurangan volume ekspor. Saya berharap, pabrik pupuk bersabar dan menunda ekspornya meski permintaan di luar negeri masih besar," kata Benny kepada

wartawan, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sejak awal tahun ini, volume ekspor pupuk mengalami tren penurunan karena keterbatasan produksi akibat pasokan gas yang berkurang. Bahkan beberapa pabrik sama sekali tidak melakukan ekspor pada tahun ini.

Menyangkut hal ini, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim), Omay.K Wiraatmadja, mengatakan, solusi kekurangan pasokan gas terhadap industri pupuk seperti yang pernah disampaikan pakar di bidang gas dan asosiasi produsen pupuk sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun lalu.

Dikatakan, seluruh pabrik memerlukan adanya prioritas karena pupuk ini merupakan barang yang dibutuhkan petani dan produksi tanaman pangan nasional secara umum. "Kalau kita kekurangan dalam hal pasokan gas tentunya akan sangat mengganggu industri pupuk," ujarnya.

Ia mengungkapkan, saat ini masalah pasokan gas belum ter-

lalu mengganggu kinerja Pupuk Kaltim karena masih ada kontrak pengadaan dengan pemasok gas nasional.

"Pasokan yang masih terganggu mungkin pabrik pupuk di Aceh. Ini yang harus diselesaikan segera. Kaltim hingga kini sudah ada kontrak pengadaan, mudah-mudahan tidak ada gangguan," paparnya.

Menyangkut masalah penutupan pabrik Pupuk Kaltim I dan ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), Omay menjelaskan, hingga saat ini belum diputuskan oleh pemerintah. Namun demikian, katanya, sepertinya rencana penutupan tidak akan terjadi karena keduanya merupakan badan usaha milik negara (BUMN).

"Semua pabrik pupuk punya kewajiban memenuhi pasokan dalam negeri. Menurut saya, pemerintah tidak menutup pabrik pupuk tapi dioptimalkan kembali dengan memberikan pasokan gas misalnya dari LNG yang di Arun. Itu juga sudah diprogramkan ta-

hun ini. Tapi, mungkin tahun depan dengan pemerintahan yang baru bisa terealisasi," ungkapnya.

Omay menjelaskan, PT Pupuk Kaltim akan memprioritaskan pasokan pupuk untuk dalam negeri. Bahkan hingga kini stok pupuk disiapkan hingga jangka waktu satu bulan atau lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah selama dua pekan.

Dirut PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Hidayat Nya'mad, mengatakan, meski PIM II dipastikan beroperasi pada April 2005 dan rencananya gas dari PIM I akan dialihkan ke PIM II, namun hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan kedua pabrik PIM akan beroperasi secara optimal.

"Pemerintah memang menjanjikan dua pabrik beroperasi yakni PIM I dan PIM II. Kalau gas cukup tidak kita matikan, kalau gas kurang ya sebaliknya. Hingga kini PIM II belum ada pasokan gasnya, kita tinggal menunggu realisasi dari komitmen pemerintah," kata Hidayat. (CW-4)

20

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 MAJALAH PILARS  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
HALAMAN : 3

TAHUN 2004

**FSP BUMN Tolak Penutupan PT AAF**

JAKARTA (Suara Karya): Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) menolak rencana pemerintah untuk menutup pabrik pupuk PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF). Alasan pemerintah yang mengatakan penutupan karena masalah pasokan gas tidak dapat diterima FSP BUMN.

Ketua Umum FSP BUMN, Abdul Azis Hasan, mengatakan, sejak 5 Agustus 2003, AAF sudah berhenti operasi disebabkan dihentikannya pasokan gas bumi oleh ExxonMobil Oil hanya karena alasan kontrak pengadaan gas sudah berakhir. Selain itu, penyebab berhentinya gas dikatakan karena kontrak ekspor gas ke Korea Selatan dan Jepang.

"Seharusnya pemerintah meninjau ulang kebijakan pengaturan distribusi gas bumi terutama untuk industri nasional di Aceh. Kita tahu industri di Aceh ini berdampak positif untuk daerah sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat," kata Abdul Azis di Jakarta, kemarin. (CW-4)

29